

TESIS

**PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
BAGI BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA
(KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
24/PUU-XXII/2024)**

*RESTRICTION OF JUDICIAL REVIEW FOR STATE ADMINISTRATIVE
OFFICIALS (A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.
24/PUU-XXII/2024)*



**ANNISA DWI LESTARI
2210622079**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI BAGI
BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA
(KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 24/PUU-
XXII/2024)**

*RESTRICTION OF JUDICIAL REVIEW FOR STATE ADMINISTRATIVE
OFFICIALS (A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.
24/PUU-XXII/2024)*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

**ANNISA DWI LESTARI
2210622079**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
BAGI BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA
(PERSPEKTIF KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 24/PUU-XXII/2024)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANNISA DWI LESTARI
2210622079

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal

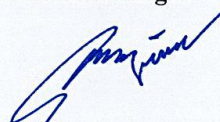
Menyetujui

Pembimbing 1



Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H.,M.H.
NIDN. 0002056002

Pembimbing 2



Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H.,M.H.
NIDN. 0004087308

TESIS

**PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI BAGI BADAN/PEJABAT
TATA USAHA NEGARA (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
24/PUU-XXII/2024)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANNISA DWI LESTARI

NIM. 2210622079

**Telah Diujikan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta**

Pada Tanggal 15 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
NIDN. 0002056002

Pembimbing II



Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
NIDN. 0004087308

**Koordinator Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sulherman, S.H., LL.M
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Annisa Dwi Lestari
NIM : 2210622079
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Perspektif Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XXII/2024) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Kaya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juli 2025



Annisa Dwi Lestari

NIM:2210622079

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Dwi Lestari

NIM : 2210622079

Program Studi : Magister Hukum Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI BAGI BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 24/PUU-XXII/2024)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 2025

Yang Menyatakan,



ANNISA DWI LESTARI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis ini, untuk dapat menyelesaikan Program Studi Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tesis dengan judul **“Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XXII/2024)”**.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Maka, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
5. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan koreksi, revisi, dan berbagai masukan dalam penyelesaian Tesis ini;
6. Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan koreksi, revisi, dan berbagai masukan dalam penyelesaian Tesis ini;
7. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H., selaku Penguji Pertama dan Penguji Kedua yang telah memberikan koreksi yang membangun pada Tesis ini;

8. Bapak dan Ibu dosen, civitas, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Kedua orang tua Penulis, Sunar Mantodi dan (almh) Sopiah, serta Ibu Sawiyah, Mas Indrawan dan Mba Nia, keponakan tercinta Rani dan Azri atas segala bimbingan, dorongan, semangat, motivasi, dan doa yang selalu mengiringi dalam penulisan karya tulis ini;
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Magister Hukum UPN “Veteran” Jakarta Angkatan 2022, khususnya kelas C1 dan kelas Kenegaraan, yang selalu saling mendukung dan memberikan saran, bantuan, dan motivasi dalam setiap perkuliahan;
11. Teman-teman ruangan Panitera Muda TUN Mahkamah Agung yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyelesaian Tesis ini;
12. Serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian Tesis ini namun tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis senantiasa mendoakan semoga segala kebaikan dan keikhlasan hatinya diberikan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah swt. Selama proses penyelesaian Tesis ini hingga tertunda 1 tahun, tentu masih terdapat banyak kekurangannya. Untuk ini Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap bahwa Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan segala upaya yang telah dilakukan dapat diridhoi oleh Allah swt.

Jakarta, 7 Juli 2025

Penulis,



ANNISA DWI LESTARI

ABSTRAK

ANNISA DWI LESTARI (NIM. 2210622079). PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI BAGI BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 24/PUU-XXII/2024). Dibimbing oleh Taufiqurrohman Syahuri sebagai Pembimbing Utama dan Ahmad Ahsin Thohari sebagai Pembimbing Pendamping.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XXII/2024 telah membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) bagi badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai upaya untuk melindungi hak warga negara dan memperkuat kepastian hukum dalam proses administrasi peradilan. Meskipun secara normatif bertujuan mengefektifkan pelaksanaan putusan pengadilan, namun berpotensi menimbulkan tantangan terhadap keadilan substantif bagi pelaksana fungsi negara. Ketentuan ini dapat menghambat kemampuan negara untuk memperbaiki putusan yang keliru, beradaptasi dengan dinamika yang berubah, atau melindungi kepentingan publik yang vital melalui penemuan bukti baru.

Penelitian ini menggunakan metode normatif secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang merujuk pada literatur dan sumber-sumber tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim sangat fundamental dalam mencari kebenaran materiil dan mencapai keadilan bagi kedua belah pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Penerapan rechtsvinding oleh hakim PTUN dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XXII/2024 menunjukkan peran aktif hakim sebagai penemu hukum (judge-made law) dalam sistem peradilan administrasi. Hakim PTUN tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan norma hukum secara konstitusional dan progresif untuk menjamin keadilan substantif. Penting untuk diperhatikan bahwa ketika berhadapan dengan badan/pejabat TUN, hakim harus mempertimbangkan bahwa mereka juga memikul kepentingan masyarakat umum. Meskipun undang-undang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum, pelaksanaannya harus senantiasa mengingat kepentingan umum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak mengabaikan Putusan MK, melainkan mengikutinya secara kontekstual. Namun, ketika muncul perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum, diperlukan penafsiran hukum untuk menghasilkan putusan yang adil. MA perlu menafsirkan makna spesifik putusan MK dalam praktik peradilan TUN, menyusun pedoman operasional yang seragam, dan mengisi potensi kekosongan atau ambiguitas dalam implementasi putusan konstitusi tersebut.

Kata kunci : Pembatasan PK, Badan/Pejabat TUN, Putusan MK

ABSTRACT

ANNISA DWI LESTARI (NIM. 2210622079). *RESTRICTION OF JUDICIAL REVIEW FOR STATE ADMINISTRATIVE OFFICIALS (A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 24/PUU-XXII/2024).* Supervised by Taufiqurrohman Syahuri as Main Supervisor and Ahmad Ahsin Thohari as Co-Supervisor.

Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XXII/2024 has limited the judicial review (PK) efforts for State Administrative Officials (TUN officials) as an attempt to protect citizens' rights and strengthen legal certainty in the administrative judicial process. While normatively aiming to streamline the execution of court decisions, this limitation potentially creates challenges for substantive justice for state functionaries. This provision may hinder the state's ability to rectify erroneous decisions, adapt to changing dynamics, or protect vital public interests through the discovery of new evidence.

This study employs a qualitative normative method. It utilizes data referenced from literature and written sources.

*The research findings indicate that the judge's role is fundamental in seeking material truth and achieving justice for both parties in State Administrative disputes. The application of *rechtsvinding* by State Administrative Court judges in interpreting Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XXII/2024 demonstrates the active role of judges as law-finders (judge-made law) within the administrative justice system. State Administrative Court judges do not merely apply the law textually, but also interpret legal norms constitutionally and progressively to ensure substantive justice. It is crucial to note that when dealing with state administrative officials, judges must consider that these officials also bear the public interest. Although the law guarantees the position of citizens before the law, its implementation must always consider the public interest. The Supreme Court through its Circular Letter (SEMA) does not disregard the Constitutional Court Decision but follows it contextually. However, when cases related to the public interest arise, legal interpretation is necessary to render a just decision. The Supreme Court needs to interpret the specific meaning of the Constitutional Court's decision in the practice of State Administrative judiciary, formulate uniform operational guidelines, and address potential gaps or ambiguities in the implementation of the constitutional decision.*

Keywords: *Limitation of PK, TUN Officials, Constitutional Court Decision*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ixx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kajian Teoritis.....	21
A.1. Teori Negara Hukum.....	21
A.2. Teori Keadilan.....	24
A.3. Teori Rechtsvinding	26
A.4. Teori <i>Beleidsregel</i>	28
B. Kerangka Pikir.....	39
C. Definisi Operasional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Sumber Data.....	42
C. Jenis Data	45
D. Metode dan Cara Pengumpulan Data.....	46

E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pembatasan Upaya Hukum PK bagi Badan/Pejabat TUN ditinjau dari Perspektif Keadilan Substantif	47
B. Penerapan <i>Rechtsvinding</i> oleh Hakim PTUN dalam Menafsirkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99